

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.I Latar Belakang**

Pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan atau mutu hidup masyarakat (Mardikanto, 2015:10). Pembangunan dapat dilakukan dalam segala bidang, salah satunya bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi yang paling utama adalah pembangunan sektor perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, meratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Pembangunan pada sektor perdagangan di suatu negara dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur perdagangan. Pembangunan infrastruktur perdagangan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk-produk yang dijual, memberi kenyamanan kepada para pedagang, pembeli dan masyarakat sekitar, meningkatkan pendapatan pedagang, memperbaiki kualitas lingkungan sekitar, dsb.

Pasar tradisional merupakan salah satu jenis pusat perdagangan yang ada di suatu wilayah. Pasar tradisional merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan/atau BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta yang dapat berupa

toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Malano (2011:2) menyatakan bahwa pasar tradisional merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat melalui kegiatan jual beli. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, nelayan, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Fungsi lainnya dari pasar tradisional adalah sebagai lapangan pekerjaan yang sangat berarti bagi masyarakat.

Selain itu pasar tradisional juga merupakan salah satu tempat bagi UMKM. UMKM adalah sektor ekonomi yang menunjang perekonomian rakyat yang terbukti tidak rentan terhadap krisis multidimensi yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Ketika banyak pengusaha besar yang bangkrut karena kekurangan modal, justru para pelaku UMKM tetap mampu bertahan. Hal ini disebabkan bisnis UMKM tidak terlalu bergantung pada produk impor sebagai bahan baku usaha mereka. UMKM juga bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja. Oleh karena itu, peran pasar tradisional sangat penting bagi kegiatan perekonomian suatu negara.

Pada tahun 2007 kurang lebih ada 13.540 pasar tradisional yang mampu menampung sekitar 13 juta pedagang kios dan lebih dari 9 juta pedagang yang berstatus sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia. Pasar tradisional merupakan salah satu pilar perekonomian yang menguasai 67,6 persen pangsa pasar

dan menghidupi lebih dari 12 juta orang di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi suatu negara (Malano, 2011:1).

Seiring dengan perkembangan perekonomian global, pola perdagangan telah melahirkan berbagai jenis pusat perbelanjaan modern seperti departmen store, mini market, super market, dan hyper market. Masyarakat dengan gaya hidup modern kini lebih memilih berbelanja di pusat perbelanjaan modern daripada di pasar tradisional. Hal itu disebabkan oleh kondisi tempat dan sistem pengelolaan toko modern yang bersih, nyaman, dan strategis. Sedangkan pasar tradisional telah digambarkan oleh sebagian besar masyarakat sebagai tempat perbelanjaan yang kotor dan tidak tertata rapi. Oleh karena itu perkembangan pesat dari pasar modern berpotensi menggerus eksistensi pasar tradisional.

Hasil survei AC Nielsen tahun 2013 menunjukkan perbandingan pertumbuhan pasar tradisional terhadap pasar modern yang cukup drastis. Pertumbuhan pasar tradisional adalah kurang dari 8,1 persen, sedangkan pertumbuhan pasar modern adalah 31,4 persen. Hasil survei AC Nielsen juga menunjukkan jumlah pasar tradisional di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 pasar tradisional berjumlah 13.540, pada tahun 2009 menyusut menjadi 13.450, dan pada tahun 2011 berjumlah 9.950. Sedangkan, berdasarkan survei Kementerian Perdagangan, pada tahun 2011 jumlah pasar modern di seluruh Indonesia adalah sebanyak 23.000 unit. Sebanyak 14.000 lebih dari jumlah tersebut merupakan kelompok usaha minimarket sehingga pembangunannya mampu tersebar ke berbagai daerah di Indonesia dengan pertimbangan jarak dan jumlah pertumbuhan penduduk suatu daerah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan

sebesar 14 persen dalam tiga tahun terakhir.. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa eksistensi pasar tradisional yang menjadi tumpuan perekonomian lokal terancam hilang oleh kehadiran pusat perbelanjaan modern. (<http://bisniskeuangan.kompas.com/> Diunduh tanggal 15 Oktober 2017)

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang menjadikan sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor utama perekonomian di masyarakat. Berdasarkan data di RPJMD Kota Semarang periode 2010 – 2015 serta periode 2016 – 2021, salah satu kontribusi terbesar pendapatan Kota Semarang dalam PDRB adalah pada sektor perdagangan. Kontribusi perdagangan dan jasa terhadap PDRB Kota Semarang tahun 2015 adalah sebesar 30,99 persen.

Sebagai kota yang menjadikan sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor utama perekonomian, selama 10 tahun terakhir ini Kota Semarang mengalami permasalahan ketimpangan jumlah pasar tradisional dengan pasar modern. Permasalahan tersebut tertera pada RPJMD Kota Semarang periode 2016-2021. Tabel dibawah ini merupakan data mengenai jumlah pasar tradisional dan pasar modern di Kota Semarang.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Pasar di Kota Semarang Tahun 2011 – 2016**

No.	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pasar Tradisional	49	50	50	50	50	50
2.	Pasar Lokal	22	23	23	23	23	23
3.	Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba	303	436	436	536	536	536
4.	Hipermarket	2	5	5	5	5	5
5.	Pasar Grosir	1	3	3	3	3	3
6.	Mal/Plaza	14	15	15	15	15	15
7.	Pertokoan/Warung/Kios	1.634	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970

*Sumber : RPJMD Kota Semarang 2016-2021*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pusat perbelanjaan modern, khususnya pasar swalayan, supermarket, dan toserba di Kota Semarang lebih banyak daripada jumlah pasar tradisional. Pada tahun 2016 jumlah pusat perbelanjaan modern yang terdiri atas Pasar Swalayan, Supermarket, Toserba, pasar grosir, dan Mal/Plaza adalah sebanyak 559, sedangkan pasar tradisional hanya sebanyak 50 pasar. Selain itu, setiap tahunnya jumlah pusat perbelanjaan modern juga semakin meningkat, kecuali untuk tiga tahun terakhir.

Melihat pada kondisi di atas, maka pembangunan infrastruktur pasar tradisional merupakan langkah yang sangat penting agar pasar tradisional tidak kalah bersaing dengan pesatnya pertumbuhan pasar modern. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pedagang-pedagang kecil. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan bahwa salah satu bentuk pembangunan infrastruktur pasar tradisional adalah melalui program revitalisasi pasar.

Menurut Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, revitalisasi pasar ditujukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kegiatan perdagangan yang terdapat di pasar. Tujuan dari revitalisasi pasar menurut Pasal 3 Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar, antara lain: (1) menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; (2) menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing; (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi; (4) mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang.

Revitalisasi pasar terdiri atas tiga jenis kebijakan. Ketiga jenis revitalisasi tersebut yaitu: penataan zonasi pasar, perubahan fungsi dan jenis pasar, dan/atau perubahan penataan kawasan pasar. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013, penataan zonasi pasar merupakan pengaturan peruntukan dan jenis dagangan di pasar, sedangkan penataan kawasan pasar merupakan perubahan keseluruhan lahan yang ditempati bangunan pasar termasuk lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan yang menerima dampak dari keberadaan pasar. Revitalisasi pasar ditetapkan setelah proses evaluasi pasar oleh walikota setelah mendapatkan masukan dari dinas yang terkait dengan pengelolaan pasar, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, pedagang, dan/atau masyarakat.

Haidar, Akib; Antonius, Tarigan dalam Mulyadi (2015:48) menyatakan bahwa pada proses implementasi kebijakan, suatu kebijakan bisa dianggap sebagai hal yang kontroversial atau menimbulkan penolakan di masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu permasalahan yang sering muncul pada kebijakan revitalisasi pasar tradisional adalah penolakan para pedagang untuk menempati pasar yang telah direvitalisasi. Beberapa contohnya antara lain :

Revitalisasi Pasar Rakyat Koba di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dengan anggaran APBN sebesar Rp 5.756.261.000. Pada tahun 2018 Pasar tersebut masih belum ditempati para pedagang sehingga sampai saat ini gedung pasar masih kosong. Keluhan pedagang

adalah lorong gedung dan meja pasar yang sempit tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang (<http://belitung.tribunnews.com>. Diunduh tanggal 25 Agustus 2018).

Pasar Kagilan Baru Kabupaten Serang yang telah selesai dibangun pada tahun 2014 dengan anggaran APBN sebesar Rp 3.4 Miliar masih belum ditempati pedagang hingga tahun 2018. Pemkab Serang sudah memberikan surat peringatan kepada para pedagang untuk segera pindah ke lokasi yang baru, namun selalu gagal. Relokasi para pedagang pasar yang lama ke pasar yang baru akan dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 (<http://tangselpos.co.id>. Diunduh tanggal 25 Agustus 2018).

Pasar Baru Porong Sidoarjo Jawa Timur, yang telah selesai dibangun oleh pemerintah pada tahun 2017 dengan dana sebesar Rp 20 Miliar belum ditempati oleh para pedagang. Puluhan pedagang Pasar Porong menolak pindah ke pasar yang baru karena tempat baru jauh dan stan untuk berjualan terlalu sempit (<https://m.detik.com/> Diunduh tanggal 25 Agustus 2018).

Permasalahan penolakan pedagang terhadap pasar yang telah direvitalisasi juga terjadi pada program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang. Pasar Rejomulyo yang juga sering disebut sebagai Pasar Kobong oleh sebagian besar masyarakat Kota Semarang itu merupakan pasar ikan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat dua kelompok besar pedagang di Pasar Kobong, yaitu kelompok pedagang ikan basah yang menjual berbagai jenis ikan dalam skala grosir maupun eceran, serta kelompok pedagang bumbu yang menjual berbagai jenis sembako dan bumbu-bumbu dapur seperti: gerabah, kelontong, buah-buahan, sayuran, dll.

Ikan-ikan dari Pasar Kobong tidak hanya dipasok oleh masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga sebagian masyarakat Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Pasar Kobong direvitalisasi pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Revitalisasi pasar dilakukan dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp30 Miliar. Revitalisasi Pasar Kobong dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi Pasar Kobong serta kondisi Pasar Kobong yang dinilai sudah kumuh dan tidak layak digunakan untuk aktivitas perdagangan ikan dan kebutuhan rumah tangga.

Revitalisasi Pasar Kobong dilakukan melalui perubahan penataan kawasan pasar. Artinya revitalisasi dilakukan melalui pembangunan gedung pasar di lokasi yang baru yang berjarak 200 meter dari pasar lama. Pasar yang baru tersebut juga dinamakan Pasar Rejomulyo. Pasar Rejomulyo yang baru memiliki dua lantai. Lantai satu diperuntukkan bagi kelompok pedagang ikan basah. Sedangkan lantai dua diperuntukkan bagi kelompok pedagang bumbu. Dikarenakan luas wilayah pasar yang baru tidak seluas pasar yang lama, maka Dinas Perdagangan memindahkan pedagang ayam bubut ke Pasar Penggaron Kota Semarang. Harapan Pemkot adalah keseluruhan pedagang Pasar Kobong yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Semarang, kecuali pedagang ayam bubut, dapat menempati Pasar Rejomulyo yang disediakan Pemkot Semarang.

Hingga tahun 2019, Lantai 1 (satu) gedung Pasar Rejomulyo yang baru masih kosong karena kelompok pedagang ikan basah masih menolak untuk pindah ke



lokasi Pasar Rejomulyo. Sedangkan kelompok pedagang bumbon sudah bersedia pindah ke lantai 2 (dua) Pasar Rejomulyo pada tahun 2017. Keengganan para pedagang ikan basah untuk pindah ke lokasi pasar yang baru tentunya menjadikan fungsi bangunan Pasar Rejomulyo yang baru kurang optimal. Berikut ini merupakan tabel jumlah pedagang ikan basah dan pedagang bumbon Pasar Kobong Tahun 2016 sebelum ada perintah pemindahan pedagang bumbon dan ikan basah dari Pasar Kobong ke Pasar Rejomulyo:

**Tabel 1. 2 Jumlah Pedagang Ikan Basah dan Bumbon Pasar Kobong (sebelum revitalisasi) Tahun 2016**

No.	Dasaran	Jumlah Pedagang
1.	Kios	39
2.	Los	295
3.	Pancakan	81
4.	Dasaran Terbuka	87
Total		502

*Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang*

Tabel 1.2 merupakan jumlah keseluruhan pedagang dari kelompok pedagang ikan basah dan pedagang bumbon. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pedagang ikan basah dan bumbon di Pasar Kobong yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Semarang tahun 2016 sebelum adanya program revitalisasi adalah sebanyak 502 pedagang. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, setelah adanya program revitalisasi, jumlah pedagang yang bersedia menempati pasar yang baru pada tahun 2018 hanya sebanyak 91 pedagang. Para pedagang yang bersedia menempati pasar baru adalah kelompok pedagang bumbon. Berdasarkan kebijakan dari Pemkot Semarang, pedagang tersebut ditempatkan di Lantai 2 (dua) Pasar Rejomulyo. Sedangkan para pedagang

yang belum bersedia menempati pasar yang baru adalah kelompok pedagang ikan basah yang diharuskan menempati lantai 1 (satu) Pasar Rejomulyo. Oleh karena itu saat ini kondisi lantai 1 (satu) Pasar Rejomulyo masih kosong. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, jumlah pedagang ikan basah yang diharuskan menempati Pasar Rejomulyo Baru adalah sebanyak 74 pedagang.

Berikut ini merupakan foto kondisi Lantai 1 (satu) Pasar Rejomulyo yang diperuntukkan bagi pedagang ikan basah serta kondisi Pasar Kobong di malam hari yang penulis ambil pada jam 18.30 WIB tanggal 20 November 2018.

**Gambar 1. 1 Kondisi Lantai 1 Pasar Rejomulyo pada Malam Hari yang diperuntukkan bagi Pedagang Ikan Basah**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

**Gambar 1. 2 Kondisi Aktivitas Perdagangan Ikan di Pasar Kobong (Pasar Rejomulyo Lama) di Malam Hari**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa hingga saat ini, lantai 1 (satu) Pasar Rejomulyo yang seharusnya ditempati oleh para pedagang ikan basah ternyata masih kosong dan belum ada aktivitas apapun karena para pedagang ikan

basah belum bersedia menempati tempat tersebut. Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa para pedagang ikan basah masih berjualan di Pasar Kobong.

Sedangkan gambar di bawah ini merupakan kondisi lantai 2 (dua) Pasar Rejomulyo yang penulis ambil pada pagi hari, sekitar pukul 08.00 WIB tanggal 21 November 2018. Lantai 2 (dua) Pasar Rejomulyo Baru merupakan tempat yang diperuntukkan bagi para pedagang bumbu yang dulunya berjualan di Pasar Kobong. Foto-foto tersebut menunjukkan bahwa kelompok pedagang bumbu sudah bersedia untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot Semarang di Pasar Rejomulyo, baik di dasaran los, kios, maupun dasaran terbuka.

**Gambar 1. 3 Kondisi Los di Lantai 2 Pasar Rejomulyo yang Sepi Pengunjung**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

**Gambar 1. 4 Kondisi DT di Lantai 2 Pasar Rejomulyo yang Sepi Pengunjung**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

**Gambar 1. 5 Kondisi Kios-Kios Pasar di Lantai 2 Pasar Rejomulyo yang Terbengkalai**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Gambar 1.3, gambar 1.4 dan gambar 1.5 menunjukkan bahwa aktivitas jual beli kelompok pedagang bumbon di Pasar Rejomulyo belum dapat beroperasi secara optimal. Hal itu dibuktikan melalui gambar 1.3 dan gambar 1.4 yang menunjukkan kondisi pasar yang masih sepi pengunjung meskipun waktu menunjukkan masih jam 08.00 WIB. Artinya meskipun masih pagi, pasar sudah terlihat sepi dan tidak terlihat masyarakat lalu lalang untuk membeli dagangan para pedagang di pasar tersebut, baik di los-los pedagang di dalam pasar maupun di dasaran terbuka. Sedangkan gambar 1.5 di atas menunjukkan banyak kios yang tutup atau sudah tidak ditempati oleh pedagang bumbon karena pedagangnya sudah enggan berjualan setelah mengalami kerugian yang dikarenakan kondisi pasar yang sepi dan tidak ada pembeli.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang bumbon yang berada di lantai 2 Pasar Rejomulyo, diperoleh informasi bahwa para pedagang mengeluhkan sikap para pedagang ikan basah yang tidak mau pindah ke lokasi pasar yang baru sehingga lantai 1 (satu) Pasar Rejomulyo menjadi kosong dan terbengkalai.

Keluhan tersebut muncul karena para pedagang yang berada di lantai 2 (dua) Pasar Rejomulyo menjadi sepi pembeli apabila tidak ada aktivitas jual beli dari para pedagang ikan basah. Pendapatan sebagian besar pedagang bumbu yang bersedia menempati Pasar Rejomulyo Baru menjadi menurun. Salah satu pedagang di berjualan bumbu dapur di lantai 2 (dua) Pasar Rejomulyo Baru yang bernama Mudjinah mengatakan:

*“...sekarang sepi, dulu saya bisa menjual 1 hingga 2 kilogram cabai merah selama 3 hari, sekarang 1 kilogram saja 2 minggu tidak habis-habis, dulu setiap kali ada orang beli ikan mereka akan mampir beli bumbu. Sekarang kami sudah pindah tapi pedagang ikan basah tidak mau pindah jadi jarang orang mau mampir dan pasarnya tidak seramai dulu.”*

Kelompok pedagang ikan basah selalu menolak instruksi Pemkot Semarang untuk pindah ke Pasar Rejomulyo. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan sudah memberikan perintah kepada para pedagang ikan basah untuk segera pindah ke pasar baru namun selalu gagal. Pada tanggal 17 Maret 2017 Dinas Perdagangan memberikan ultimatum kepada para pedagang ikan basah untuk pindah ke lokasi yang baru. Selain itu Dinas Perdagangan juga memerintahkan untuk mencabut aliran listrik Pasar Kobong untuk mendorong para pedagang untuk segera pindah namun upaya tersebut gagal. Pada tanggal 24 April 2018 Dinas Perdagangan memerintahkan kembali para pedagang ikan basah untuk segera pindah ke pasar baru maksimal tanggal 2 Mei 2018 serta pada tanggal pada tanggal 3 Mei 2018 Dinas Perdagangan akan melakukan pemutusan aliran listrik di Pasar Kobong namun upaya tersebut juga tetap gagal. Pada tanggal 28 Juli 2018 Dinas Perdagangan kembali memberikan ultimatum bagi para pedagang yang masih berada di Pasar Kobong untuk segera menempati Pasar Rejomulyo Baru. Dinas

Perdagangan berharap pada bulan Agustus 2018 kondisi Pasar Rejomulyo sudah terisi penuh dengan pedagang bumbu dan ikan basah sehingga pasar bisa beroperasi secara optimal. Namun kenyataannya hingga akhir tahun 2018 kondisi di lantai 1 Gedung A Pasar Rejomulyo masih kosong dan para pedagang ikan basah masih berdagang di Pasar Kobong.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang untuk menempatkan kembali para pedagang pasar pasca proses revitalisasi telah ditetapkan di Ayat (2) poin b Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Ayat (2) Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional berbunyi, *“Dalam pelaksanaan evaluasi, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk : a. Menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar yang terkena evaluasi pasar ; b. Menempatkan kembali para pedagang lama di pasar semula; atau c. Menempatkan para pedagang lama di pasar lain yang sesuai, dalam hal evaluasi dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan d.”*

Berdasarkan ketentuan dari Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar, revitalisasi pasar merupakan program yang dihasilkan dari proses evaluasi pasar. Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional menyatakan bahwa evaluasi pasar merupakan upaya yang ditunjukkan untuk menilai pasar agar keberadaan dan fungsinya dapat sejalan dengan tujuan pengaturan pasar. Rekomendasi dari evaluasi

pasar dapat menghasilkan 4 (empat) program terkait dengan kebijakan pengaturan pasar tradisional, salah satunya adalah program revitalisasi pasar.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, Pemerintah Kota Semarang bertanggung jawab untuk menempatkan kembali para pedagang di pasar semula setelah program revitalisasi pasar selesai dilakukan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang bertanggung jawab untuk menempatkan para pedagang termasuk pedagang ikan basah ke tempat baru yang sudah disediakan, yaitu Pasar Rejomulyo.

Namun berdasarkan fakta yang ada di lapangan, ternyata jumlah pedagang di Pasar Rejomulyo justru menurun karena para pedagang ikan basah enggan untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot. Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi atau pelaksanaan program revitalisasi Pasar Rejomulyo yang dilakukan oleh Pemkot Semarang tidak optimal.

Apabila permasalahan tersebut terus berlanjut maka eksistensi Pasar Kobong sebagai pasar ikan skala grosir yang terbesar pertama di Provinsi Jawa Tengah dan terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Pasar Muara Angke Jakarta itu akan terancam hilang dan akan membawa pengaruh negatif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Rata-rata omset keseluruhan pedagang Pasar Rejomulyo per harinya adalah Rp 2 Miliar dan bisa lebih apabila sedang musim ikan. Selain itu kelompok pedagang bumbon yang sudah bersedia pindah ke Pasar Rejomulyo menilai, apabila para pedagang ikan basah terus menolak untuk

menempati tempat yang sudah disediakan Pemerintah Kota Semarang di Pasar Rejomulyo, maka tingkat pendapatan para pedagang bumbu di pasar tersebut akan terus menurun dibandingkan dengan pendapatan mereka ketika masih berjualan di Pasar Kobong.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan yang sudah peneliti jabarkan di atas maka pertanyaan penelitian yang hendak peneliti jawab pada penelitian ini adalah, *“Mengapa program revitalisasi Pasar Rejomulyo tidak bisa berjalan secara optimal?”* Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI PASAR REJOMULYO KOTA SEMARANG”** untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penataan kembali para pedagang Pasar Rejomulyo setelah adanya program revitalisasi pasar dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program tersebut sehingga menimbulkan kondisi yang terjadi di lapangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan ingin menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah. Secara konkrit, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian pada bidang analisis implementasi kebijakan publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait, khususnya Pemerintah Kota Semarang untuk program revitalisasi, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar tradisional berikutnya.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. 3 Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis, Judul, Tahun Terbit, Sumber Jurnal	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan Penelitian
1.	<p><b>Penulis:</b> Ratu Arum</p> <p><b>Judul:</b> Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang.</p> <p><b>Tahun:</b> 2016</p> <p><b>Sumber Jurnal:</b> Fisip Untirta Repository</p>	<p><b>Tujuan penelitian:</b> untuk mengetahui implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang dan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Artinya mendeskripsikan objek dan fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data secara kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi di Pasar Bandeng masih belum optimal. Faktor penghambat dari belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut antara lain: ukuran dan tujuan kebijakan yang belum optimal, kurangnya jumlah SDM, komunikasi antara pelaksana kebijakan dan pihak sasaran kebijakan yang kurang optimal, kondisi ekonomi, sosial dan politik kelompok sasaran yang belum mendukung pelaksanaan kebijakan. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain: komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik dan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang adalah terletak pada lokus yang diteliti serta teori yang digunakan. Lokus penelitian tersebut adalah di Pasar Ikan Rejomulyo Kota Semarang. Sedangkan lokus penelitian Ratu Arum adalah di Pasar Bandeng Kota Tangerang. Selain itu, penelitian Ratu Arum menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Sedangkan penelitian implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Rejomulyo menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabatier serta George Edward.</p>

			kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan juga sudah baik.	
2.	<p><b>Penulis:</b> Dhika Adi Pradana</p> <p><b>Judul:</b> Implementasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta (Studi Kasus Pasar Ngemplak Surakarta).</p> <p><b>Tahun:</b> 2015</p> <p><b>Sumber Jurnal:</b> Universitas Sebelas Maret Institutional Repository</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Ngemplak Surakarta.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Pasar Ngemplak Surakarta. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi Pasar Ngemplak Surakarta sudah berjalan secara optimal. Faktor pendukung dari optimalnya program tersebut antara lain: standar dan sasaran kebijakan, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dibantu oleh badan-badan yang lain yang berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pembagian tugas SDM yang kurang berorientasi pada kemampuan atau keahlian SDM.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang adalah terletak pada lokus yang diteliti serta teori yang digunakan. Lokus penelitian ini adalah di Pasar Ngemplak Surakarta. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Sedangkan penelitian implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Rejomulyo menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabatier serta George Edward.</p>

3.	<p><b>Penulis:</b> Nova Maulana, Sulistiyowati, Turtiantoro</p> <p><b>Judul:</b> Studi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang.</p> <p><b>Tahun:</b> 2013</p> <p><b>Sumber Jurnal:</b> E-journal undip</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> untuk mendeskripsikan tentang kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Bulu Kota Semarang oleh Pemda Kota Semarang.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan pemilihan informan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.</p>	<p>Sumber dana kebijakan ini adalah APBD Kota Semarang 2012. Program utamanya adalah relokasi sementara saat sedang membangun gedung baru dan pembongkaran Pasar Bulu lama serta pengembangan gedung baru. Rencana program adalah membangun pasar Bulu menjadi pasar Semi Modern. Para pedagang menerima kebijakan ini dengan baik dan bersedia direlokasi sementara. Kualitas komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap para pedagang sangat kurang.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang adalah terletak pada tujuan dan lokus penelitian. Tujuan penelitian ini hanya menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada pada proses implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Bulu. Sedangkan tujuan penelitian pada penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo adalah menjelaskan fenomena yang ada selama proses implementasi serta analisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabatier serta George Edward. Lokus penelitian ini adalah di Pasar Bulu Kota Semarang, sedangkan lokus penelitian revitalisasi Pasar Rejomulyo adalah di Pasar Rejomulyo Kota Semarang.</p>
----	---	---	---	---

4.	<p><b>Penulis:</b> Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, Siswidiyanto</p> <p><b>Judul:</b> Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang).</p> <p><b>Tahun:</b> 2015</p> <p><b>Sumber Jurnal:</b> Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Vol.3 No.5</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> untuk mengetahui, menganalisis dan menggambarkan pola kerjasama antar aktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam perspektif good governance dan upaya apa saja yang diambil dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perspektif <i>good governance</i>, antara lain: akuntabilitas, partisipasi, <i>predictibility (rule of law)</i>, dan transparansi. Dalam mendukung proses revitalisasi terdapat berbagai upaya antara lain adalah aspek fisik yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar dan aspek nonfisik yang berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang adalah terletak pada fokus dan lokus penelitian serta teori yang digunakan. Fokus penelitian Ella Alfianita, dkk adalah kerjasama antar aktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam perspektif good governance dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang. Lokus penelitiannya adalah di Pasar Tumpang Kabupaten Malang. Teori yang digunakan adalah prinsip-prinsip good governance menurut Bank Dunia yang terdiri atas: <i>Accountability, Participation, Predictibility, dan Transparency</i>. Sedangkan penelitian implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Rejomulyo berfokus pada implementasi kebijakan revitalisasi pasar. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier serta George Edward.</p>
----	---	---	--	--

5.	<p><b>Penulis:</b> Humam Mujahidin Ar Rosyidi</p> <p><b>Judul:</b> Analisis Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan.</p> <p><b>Tahun:</b> 2016</p> <p><b>Sumber Jurnal:</b> E-journal undip</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> untuk mengetahui pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional Ir. Soekarno yang telah selesai serta mengetahui dampaknya bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah khususnya dalam pengelolaan pasar tradisional Ir. Soekarno.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi.</p>	<p>Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan baik. Mengenai dampaknya terhadap pelayanan pasar tradisional Ir. Soekarno dapat kita ketahui bahwa dengan adanya penambahan fasilitas pasar tradisional seperti peningkatan keamanan dan kebersihan, penambahan jumlah tenaga kerja, pembuatan area parkir dan ruang terbuka telah menjawab kebutuhan pelayanan pasar tradisional Ir. Soekarno.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang adalah terletak pada fokus dan lokus penelitian serta teori yang digunakan. Fokus penelitian ini adalah selain analisis implementasi kebijakan juga analisis dampak kebijakan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Lokus penelitiannya adalah di Pasar Tradisional Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo.</p>
6.	<p><b>Penulis:</b> Jiyeon Kim, Minkweon Lee, Minsun Yeom</p> <p><b>Judul:</b> Revitalization of the Gil-Dong Traditional Market in Korea.</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> Untuk mengetahui strategi apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Seoul dalam merevitalisasi Pasar Tradisional Gil-Dong.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan tiga strategi untuk merevitalisasi pasar Gil-Dong. Pertama, gaya hidup generasi muda harus dipertimbangkan. Strategi ini berfokus pada penyediaan lingkungan belanja yang nyaman digunakan sebagai tempat belanja dan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Rejomulyo adalah pada aspek fokus dan lokus penelitian. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui jalan keluar yang paling efektif untuk merevitalisasi pasar tradisional melalui analisis SWOT serta oservasi pada kesuksesan</p>

	<p><b>Tahun:</b> 2014</p> <p><b>Sumber Jurnal:</b> Journal of Marketing Thought</p>	<p>deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi untuk menganalisis kondisi geografi, demografi dan pasar pada Pasar Gil-Dong Kota Seoul, Korea Selatan sehingga dapat dilakukan analisis SWOT pada program revitalisasi Pasar Gil-Dong.</p>	<p>rekreasi. Kedua, dengan mendorong untuk memperlakukan pelanggan dengan cara yang ramah serta memusyawarahkan segala program revitalisasi pasar dengan masyarakat dan kelompok sasaran. Ketiga, dikarenakan pasar Gil-Dong belum memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan pasar-pasar lainnya maka diperlukan pengembangan identitas berdasarkan karakteristik tempat tinggal lokal disarankan. Akhirnya, penelitian ini menyarankan transformasi pasar menjadi pasar komunitas.</p>	<p>program revitalisasi pasar di pasar-pasar yang lain di Korea Selatan. Lokus penelitian adalah di Pasar Tradisional Gil-Dong Kota Seoul Korea Selatan.</p>
--	---	--	--	--

Penelitian oleh Ratu Arum yang berjudul Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang dan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan revitalisasi di Pasar Bandeng masih belum optimal. Faktor penghambat dari belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut antara lain: ukuran dan tujuan kebijakan yang belum optimal, kurangnya jumlah SDM, komunikasi antara pelaksana kebijakan dan pihak sasaran kebijakan yang kurang optimal, kondisi ekonomi, sosial dan politik kelompok sasaran yang belum mendukung pelaksanaan kebijakan. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain: komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik dan kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan juga sudah baik. Perbedaan dengan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang adalah terletak pada lokus yang diteliti serta teori yang digunakan.

Penelitian oleh Dhika Adi Pradana yang berjudul Implementasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta (Studi Kasus Pasar Ngemplak Surakarta) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Ngemplak Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi Pasar Ngemplak Surakarta sudah berjalan secara optimal. Faktor pendukungnya antara lain: standar dan sasaran kebijakan, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok



sasaran, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dibantu oleh badan-badan yang lain yang berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pembagian tugas SDM yang kurang berorientasi pada kemampuan atau keahlian SDM. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang adalah terletak pada lokus yang diteliti serta teori yang digunakan.

Penelitian oleh Nova Maulana, Sulistyowati, dan Turtiantoro yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Bulu Kota Semarang oleh Pemda Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah penjelasan bahwa program utama revitalisasi adalah relokasi sementara saat sedang membangun gedung baru dan pembongkaran Pasar Bulu lama serta pengembangan gedung baru. Rencana program adalah membangun pasar Bulu menjadi pasar Semi Modern. Para pedagang menerima kebijakan ini dengan baik dan bersedia direlokasi sementara. Kualitas komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap para pedagang sangat kurang. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang adalah terletak pada tujuan dan lokus penelitian.

Penelitian oleh Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya dan Siswidiyanto yang berjudul Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif *Good Governance* (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang) bertujuan untuk menganalisis dan

menggambarkan pola kerjasama antar aktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam perspektif *good governance* dan upaya apa saja yang diambil dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perspektif *good governance*, antara lain: akuntabilitas, partisipasi, *predictability* (rule of law), dan transparansi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang adalah terletak pada fokus dan lokus penelitian serta teori yang digunakan.

Penelitian oleh Humam Mujahidin Ar Rosyidi yang berjudul Analisis Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional Ir. Soekarno serta mengetahui dampaknya bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan baik. Mengenai dampaknya terhadap pelayanan pasar tradisional Ir. Soekarno dapat kita ketahui bahwa dengan adanya penambahan fasilitas pasar tradisional seperti peningkatan keamanan dan kebersihan, penambahan jumlah tenaga kerja, pembuatan area parkir dan ruang terbuka telah menjawab kebutuhan pelayanan pasar tradisional Ir. Soekarno.

Penelitian oleh Jiyeon Kim, Minkweon Lee, dan Minsun Yeom yang berjudul *Revitalization of the Gil-Dong Traditional Market in Korea* bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Seoul dalam merevitalisasi Pasar Tradisional Gil-Dong. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menghasilkan tiga strategi untuk merevitalisasi pasar Gil-Dong. Pertama, gaya hidup generasi muda harus dipertimbangkan. Strategi ini berfokus pada penyediaan lingkungan belanja yang nyaman digunakan sebagai tempat belanja dan rekreasi. Kedua, dengan mendorong untuk memperlakukan pelanggan dengan cara yang ramah serta memusyawarahkan segala program revitalisasi pasar dengan masyarakat dan kelompok sasaran. Ketiga, dikarenakan pasar Gil-Dong belum memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan pasar-pasar lainnya maka diperlukan pengembangan identitas berdasarkan karakteristik tempat tinggal lokal disarankan. Akhirnya, penelitian ini menyarankan transformasi pasar menjadi pasar komunitas.

### **1.5.2 Konsep Administrasi Publik**

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu "*ad*" dan "*ministrare*" yang berarti "*to serve*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi (Pasolong, 2011:2). Sedangkan pendapat A. Dunsire dalam Keban (2008:2) menyatakan administrasi sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan

kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik..

Pengertian Publik menurut Syafi'ie dkk dalam Pasolong (2011:6) adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditentukan.

Dalam kenyataannya tinjauan terhadap beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan "administrasi publik" karena administrasi publik merupakan konsep yang kompleks. McCurdy dalam Keban (2004:3) dalam studi literturnya mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai satu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik.

Keban (2004:4) menyatakan istilah *administrations of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah

dan prakarsa yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. Kemudian istilah *administratif for public* menunjukkan satu konteks yang lebih maju dari yang pertama diatas, yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*Service provider*). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Administrasi publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Hal yang serupa diungkapkan oleh Stillman II dalam Keban (2004:5) yaitu bahwa definisi administrasi publik sangat bervariasi bahkan sulit untuk disepakati.

### **1.5.3 Konsep Kebijakan Publik**

Kehidupan yang modern tidak dapat lepas dari kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan dan definisi kebijakan publik. Masih-masing definisi tersebut memiliki penekanan-penekanan yang berbeda. Perbedaan muncul karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda. Beberapa konsep administrasi publik yang diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1. Thomas R Dye dalam Winarno (2014:20) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

2. Richard Rose dalam Winarno (2014:20) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Menurut James Anderson dalam Winarno (2014:23) kebijakan publik adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Konsep kebijakan publik secara rinci terdiri dari:

1. Kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan;
2. Kebijakan merupakan tindakan yang saling berpola dan terkait, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, bukan keputusan yang berdiri sendiri;
3. Kebijakan adalah apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah di bidang-bidang tertentu;
4. Kebijakan publik dapat bersifat positif dan negatif. Secara positif kebijakan mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi masalah tertentu, sedangkan secara negatif mencakup keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun pada suatu kejadian atau kondisi.

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya. Sementara

berdasarkan teori Bromley dalam Mulyadi (2014:39) kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu:

1. *Policy Level*, diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif pada tingkat ini, terdapat lembaga tinggi negara atau badan legislatif yang berwenang mengeluarkan peraturan (kebijakan) dalam skala terluas, misalnya dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
2. *Organizational Level*, diperankan oleh lembaga eksekutif. Setiap kebijakan perlu adanya pengaturan tentang siapa pelaksana dari suatu kebijakan, siapa penanggung jawabnya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diberlakukan, dsb.
3. *Operational Level*, dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan, atau kementerian. Aturan-aturan atau kebijakan yang telah jelas penanggung jawabnya agar dapat dilaksanakan, biasanya menggunakan aturan operasional terperinci dan teknis.

Kebijakan publik adalah fungsi dari pilar organisasi dan manajemen. Unsur organisasi di dalam perspektif ini adalah negara, sedangkan unsur manajemen adalah Pemerintahan. Negara dipandang sebagai suatu wadah dalam arti statis. Unsur ini memerlukan mesin penggerak yang dapat mendinamisasikan. Unsur dinamis ini adalah manajemen, yang di dalam sistem kenegaraan lebih dikenal sebagai pemerintahan. Dalam perspektif ini bertemunya unsur negara dan

pemerintahan yang akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan atau hukum yang lazim disebut kebijakan publik.

Menurut Winarno (2014:35) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi kriteria berikut:

- 1) melampaui suatu proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama dibiarkan.
- 2) memiliki sifat partikularis, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar. Misalnya isu tentang kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global.
- 3) mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest.



4) mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan, legitimasi, dan masyarakat.

5) menjadi tren atau sedang diminati oleh banyak orang.

## 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaiknya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan.

## 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara lembaga atau keputusan pengadilan. Pada saat melakukan adopsi kebijakan, dilakukan pula legitimasi kebijakan. Bentuk-bentuk legitimasi kebijakan publik ini biasanya tertuang dalam aturan hukum seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda)

## 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan yang telah disepakati selanjutnya dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah

di tingkat bawah. Kebijakan diimplementasikan dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

#### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah publik. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran dan kriteria yang menjadi dasar penilaian apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

#### **1.5.4 Konsep Program**

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Menurut Dye (1992), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai “*Whatever government choose to do or not to do*”. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian program itu sendiri menurut Jones (1984) adalah cara yang disahkan oleh pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan dan program

merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Maka dari itu program merupakan penjabaran dari kebijakan dan berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan kebijakan.

### **1.5.5 Konsep Implementasi Program**

Gordon dalam Keban (2004:58) mengatakan bahwa implementasi adalah kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan program yang telah diseleksi. Menurut Goggin dkk dalam Keban (2004:58) implementasi generasi pertama adalah secara *top down*. Penilaian implementasi ditentukan dari seberapa jauh terjadi deviasi terhadap desain yang telah ditetapkan. Generasi kedua merupakan reaksi terhadap kelemahan generasi pertama. Implementasi generasi kedua adalah *bottom up* dimana eksistensi jaringan kerja para aktor, termasuk tujuan, strategi dan aksi mereka ikut diperhitungkan. Sebagaimana diungkapkan Linder dan Peters (1986) dan juga Nakamura (1987), desain program harus mempertimbangkan kebutuhan dan nilai yang dianut para implementor, karena itu adaptasi dan diskresi dalam implementasi seharusnya dilihat sebagai suatu yang seharusnya atau diinginkan. Implementasi generasi ketiga, pusat perhatian diarahkan pada desain kebijakan, jaringan kebijakan, dan implementasinya pada pelaksanaan dan keberhasilannya. Kegagalan dalam pelaksanaan dilihat sebagai produk dari desain yang kurang mempertimbangkan berbagai faktor yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan.

Menurut Nugroho (2009:521) pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan implementasi program. Keempat tepat tersebut antara lain:

1. Ketepatan kebijakan. Ada tiga jenis penilaian, yaitu (1) penilaian kebijakan dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, (2) apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan (3) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.
2. Ketepatan pelaksana. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan/atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat seperti penganggulangan kemiskinan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat.
3. Ketepatan target. Hal ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu (1) apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain, (2) apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, (3) apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Ketepatan lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan efektivitas kebijakan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal

kebijakan. Lingkungan kebijakan adalah interaksi di antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan terdiri atas persepsi publik akan kebijakan dan implementasinya, interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasinya, serta individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan.

#### **1.5.5.1 Model Implementasi Kebijakan**

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono Mulyadi (2015:70) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

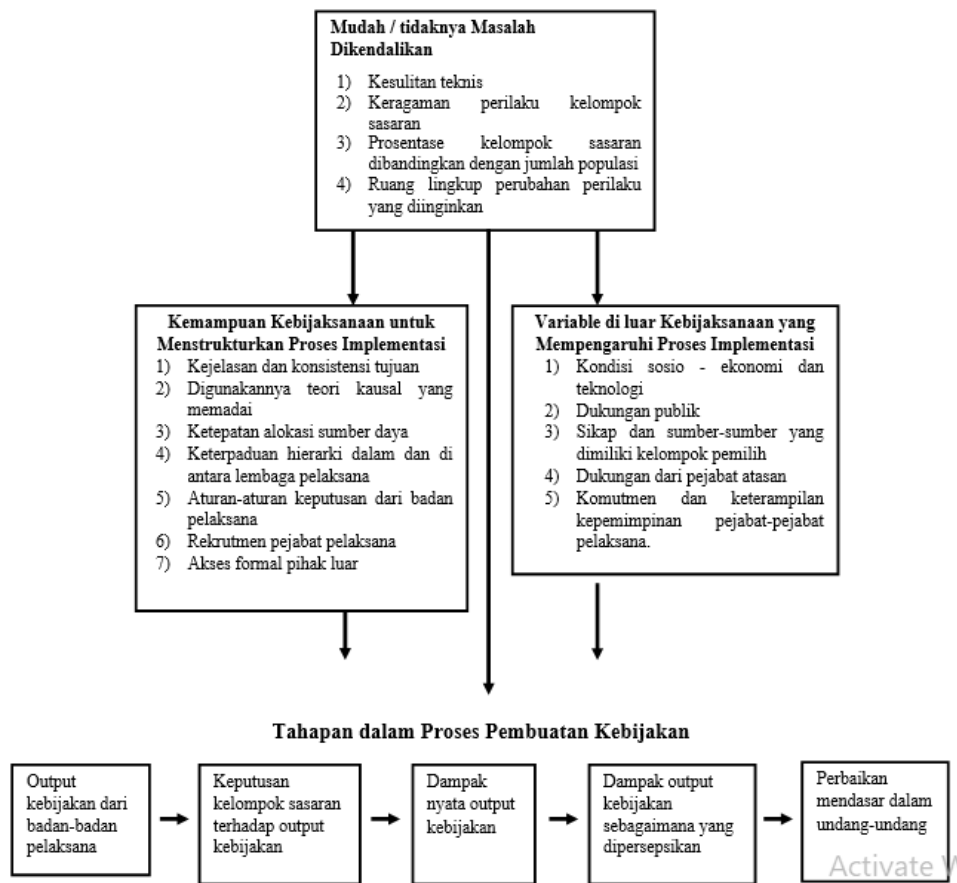
1. Karakteristik dari masalah indikatornya:
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
  - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
  - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan / undang-undang, indikatornya:
  - a. Kejelasan isi kebijakan
  - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

- c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

### 3. Variabel lingkungan

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
- c. Sikap kelompok pemilih
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

**Gambar 1. 6 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian & Sabatier**



*Sumber: Mardiasmo (2015:71)*

### 1.5.6 Pengertian Revitalisasi

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi dilakukan karena kawasan tersebut mengalami penurunan kualitas fisik dan non fisik yang disebabkan antara lain penurunan produktivitas ekonomi, degradasi lingkungan, dan/atau kerusakan warisan budaya.

Martokusumo (2008:57-73) pada penelitiannya yang berjudul "Revitalisasi, sebuah Pendekatan dalam Peremajaan Kawasan" menyebutkan bahwa penetapan kriteria dan rencana revitalisasi kawasan dapat dilakukan dengan menelaah penyebab penurunan kinerja kawasan. Dimensi penurunan kinerja sebuah kawasan kota dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan yang buruk, artinya ditinjau dari segi infrastruktur fisik dan sosial tidak layak lagi untuk dihuni. Kondisi buruk tersebut mempercepat proses degradasi lingkungan yang dipastikan justru kontra produktif terhadap proses kehidupan sosial budaya yang sehat;
2. Tingkat kepadatan bangunan dan manusia melampaui batas daya dukung lahan dan kemampuan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang ada;
3. Efektivitas pemanfaatan lahan sangat rendah, akibat terjadinya penurunan aktivitas atau dengan kata lain under utilised. Hal ini dapat pula diakibatkan oleh alokasi fungsi yang tidak tepat termasuk lahan-lahan yang tidak memiliki fungsi yang jelas;
4. Lahan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut karena misalnya letak yang sangat strategis bagi pengembangan tata kota dan tingkat percepatan pembangunan yang tinggi;
5. Batasan luas lahan yang cukup, harga memadai dan proses pembebasan lahan memungkinkan;



6. Memiliki aset lingkungan yang menonjol, seperti peninggalan bersejarah yang tidak tergantikan, misalnya tradisi penduduk yang khas terhadap pemanfaatan ruang hidupnya (cultural landscape), unsur alami yang menarik, sumber tenaga kerja, infrastruktur dasar yang relatif memadai.

Penyusunan kegiatan revitalisasi dalam kaitannya dengan pembangunan kota harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Revitalisasi merupakan bagian dari strategi pembangunan kota dan merupakan proses yang berkelanjutan;
2. Revitalisasi memerlukan pendekatan yang lengkap dan komprehensif;
3. Diperlukan koordinasi antar pelaku (stakeholders) yang terpadu;
4. Ditunjang oleh perangkat kebijakan dan peraturan perundangan yang mantap.

Menurut ketentuan pada Pasal 34 – 35 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, revitalisasi pada pasar tradisional diawali dari proses evaluasi pasar. Evaluasi pasar ditujukan untuk menilai pasar agar keberadaan dan fungsinya dapat sejalan dengan tujuan pengaturan pasar. Evaluasi pasar menghasilkan 4 (empat) jenis rekomendasi tindakan, yaitu revitalisasi pasar, rehabilitasi bangunan fisik pasar, pembangunan kembali bangunan fisik pasar, dan/atau penghapusan pasar.

Revitalisasi pasar ditujukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kegiatan perdagangan yang terdapat di pasar. Revitalisasi pasar dapat berupa penataan zonasi pasar, perubahan fungsi pasar, dan/atau perubahan penataan kawasan pasar. Pada implementasinya, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar yang terkena evaluasi pasar. Setelah rekomendasi dari evaluasi pasar selesai dilakukan, maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menempatkan kembali para pedagang lama di pasar semula atau menempatkan para pedagang lama di pasar lain yang sesuai apabila rekomendasinya adalah revitalisasi dan/atau penghapusan pasar.

### **1.5.7 Pasar Tradisional**

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Malano (2011:62) menyatakan bahwa Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang disediakan oleh penjual maupun pengelola pasar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Kriteria pasar tradisional antara lain:

4. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah
5. transaksi dilakukan secara tawar menawar
6. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama
7. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, Pasar dibedakan dalam golongan sebagai berikut:

1. menurut lokasi dan kemampuan pelayanan, pasar digolongkan dalam :
  - a. Pasar Regional, yaitu pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual baik secara grosiran maupun eceran yang biasa dikunjungi oleh para pembeli dari luar wilayah kota.
  - b. Pasar Kota, yaitu pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah kota.
  - c. Pasar Wilayah, yaitu pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa wilayah lingkungan pemukiman.
  - d. Pasar Lingkungan, yaitu pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan pemukiman di sekitar pasar tersebut.
2. menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi:
  - a. Pasar Induk, yaitu pasar yang menunjukkan perdagangannya sebagai pusat pengumpulan, pusat pelelangan, pusat penyimpanan, pusat penjualan barang-barang.
  - b. Pasar Grosir, yaitu tempat kegiatan/usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar, misalnya lusinan, kodian, satu dus, satu karton, dll. Pasar grosir dimiliki oleh pedagang besar dan pembelinya pedagang eceran.

- c. Pasar Eceran, yaitu pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil.
3. menurut waktu kegiatan, pasar digolongkan menjadi:
- d. Pasar Siang, yaitu pasar yang melakukan aktivitasnya di siang hari.
  - e. Pasar Malam, yaitu pasar yang melakukan aktivitasnya di malam hari.
  - f. Pasar Siang Malam, yaitu pasar yang melakukan aktivitasnya di siang hari sampai malam hari.
8. menurut jenis dagangan, pasar digolongkan menjadi:
- a. Pasar Umum, yaitu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang dagangan.
  - b. Pasar Khusus, yaitu pasar yang memperjualbelikan jenis barang tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Menurut ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, tujuan pengaturan pasar antara lain untuk:

1. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
4. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi;
6. Mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan;
7. Mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh koperasi, swasta, BUMN, dan BUMD. Peningkatan daya saing pasar tradisional salah satunya dapat dilakukan melalui peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional.

## **1.6 Fenomena Penelitian**

Fokus utama yang akan dikaji pada penelitian ini adalah implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang. Fokus tersebut dilatarbelakangi oleh adanya masalah pada jalannya implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang, yaitu penolakan dari kelompok pedagang ikan basah, untuk pindah dari Pasar Kobong (Pasar Rejomulyo lama) ke Pasar Rejomulyo, yang merupakan pasar baru yang dibangun Pemkot Semarang untuk kelompok pedagang ikan basah dan kelompok pedagang bumbu eks Pasar Kobong dalam rangka program revitalisasi pasar. Selama ini, permasalahan tersebut membuat Pasar Rejomulyo tidak bisa beroperasi secara optimal.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji fenomena – fenomena yang terjadi pada proses implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo guna mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program revitalisasi tersebut. Aspek-aspek yang digunakan peneliti untuk mengkaji fenomena – fenomena yang ada antara lain peneliti jabarkan sebagai berikut:

### **1. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang**

Nugroho (2009:521) menyatakan bahwa untuk mengetahui keefektifan implementasi program, ada empat hal yang harus dipenuhi, antara lain : ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji fenomena-fenomena yang ada pada proses

implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang menggunakan keempat pedoman tersebut. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1) Ketepatan kebijakan

- a. Apakah isu atau masalah yang mendasari adanya program revitalisasi Pasar Rejomulyo.
- b. Bagaimana bentuk revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pelaksana program.
- c. Sejauh mana program revitalisasi Pasar Rejomulyo dapat menyelesaikan isu atau masalah yang hendak dipecahkan.

2) Ketepatan Pelaksana

- a. Aktor/pelaksana pelaksana yang terlibat dalam program revitalisasi Pasar Rejomulyo.
- b. Kewenangan atau peran dari para aktor pelaksana tersebut dalam implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo.
- c. Stakeholders yang terlibat selama implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo.

3) Ketepatan Target

- a. Apakah isi program revitalisasi Pasar Rejomulyo sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh program tersebut.



- b. Apakah target program dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak.

#### 4) Ketepatan Lingkungan

##### a. Lingkungan Endogen

- Instansi/lembaga apa saja yang turut serta membantu para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan program revitalisasi Pasar Rejomulyo.
- Apakah peran dari instansi/lembaga tersebut dalam perencanaan/pelaksanaan program revitalisasi Pasar Rejomulyo.
- Apakah kendala yang dihadapi oleh instansi pelaksana dalam rangka koordinasi dengan instansi-instansi atau lembaga yang ikut membantu dalam program revitalisasi Pasar Rejomulyo.

##### b. Lingkungan Eksogen

- Bagaimana persepsi masyarakat mengenai program revitalisasi Pasar Rejomulyo.
- Bagaimana persepsi kelompok sasaran mengenai program revitalisasi Pasar Rejomulyo.
- Bagaimana persepsi para pelaksana mengenai pelaksanaan program revitalisasi Pasar Rejomulyo.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang**

Dalam mengamati faktor pendukung dan penghambat implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang, peneliti menggunakan teori implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Berdasarkan teori ini, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek. Penjabaran ketiga aspek yang ada adalah sebagai berikut:

### 1) Karakteristik dari Masalah

- a. Tingkat kemajemukan/keanekaragaman pedagang di Pasar Rejomulyo dilihat dari jenis dagangannya.
- b. Apakah tingkat kemajemukan jenis dagangan para pedagang di Pasar Rejomulyo mempengaruhi isi program revitalisasi yang telah direncanakan Pemkot Semarang.
- c. Apakah masalah yang muncul dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi Pasar Rejomulyo

### 2) Karakteristik Kebijakan

- a. Kejelasan Isi Kebijakan
  - Apakah dasar dan pedoman yang digunakan dalam merencanakan isi program.
  - Apakah isi program dibuat secara sistematis, jelas dan terukur.

- Apakah tersedia standar keberhasilan program yang jelas dan terukur.
- Apakah terdapat *timeline* kegiatan yang jelas yang menjadi pedoman bagi implementor dalam melaksanakan program.

b. Sumber Daya

- Apakah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sudah memadai dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi Pasar Rejomulyo.
- Apakah kompetensi SDM yang ada sudah sesuai/memadai dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi Pasar Rejomulyo.
- Apakah ketersediaan sumber daya finansial sudah mencukupi dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi Pasar Rejomulyo.

c. Disposisi Implementor

Disposisi implementor adalah tingkat komitmen aparat terhadap tujuan program. Berdasarkan pengertian tersebut penulis menjabarkannya sebagai berikut:

- Bagaimana komitmen implementor dalam pemilihan lokasi pasar.

- Bagaimana komitmen implementor pada proses perencanaan.
- Bagaimana komitmen implementor pada proses implementasi program.
- Bagaimana komitmen implementor terhadap masukan dan keluhan pedagang.
- Bagaimana komitmen implementor terhadap pedagang pasca pembangunan pasar.

d. Komunikasi

- Kapan implementor melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran.
- Metode yang digunakan oleh implementor untuk melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran.
- Bagaimana respon kelompok sasaran terhadap informasi yang dikomunikasikan oleh implementor.

e. Akses Kelompok Sasaran untuk Berpartisipasi dalam Kebijakan

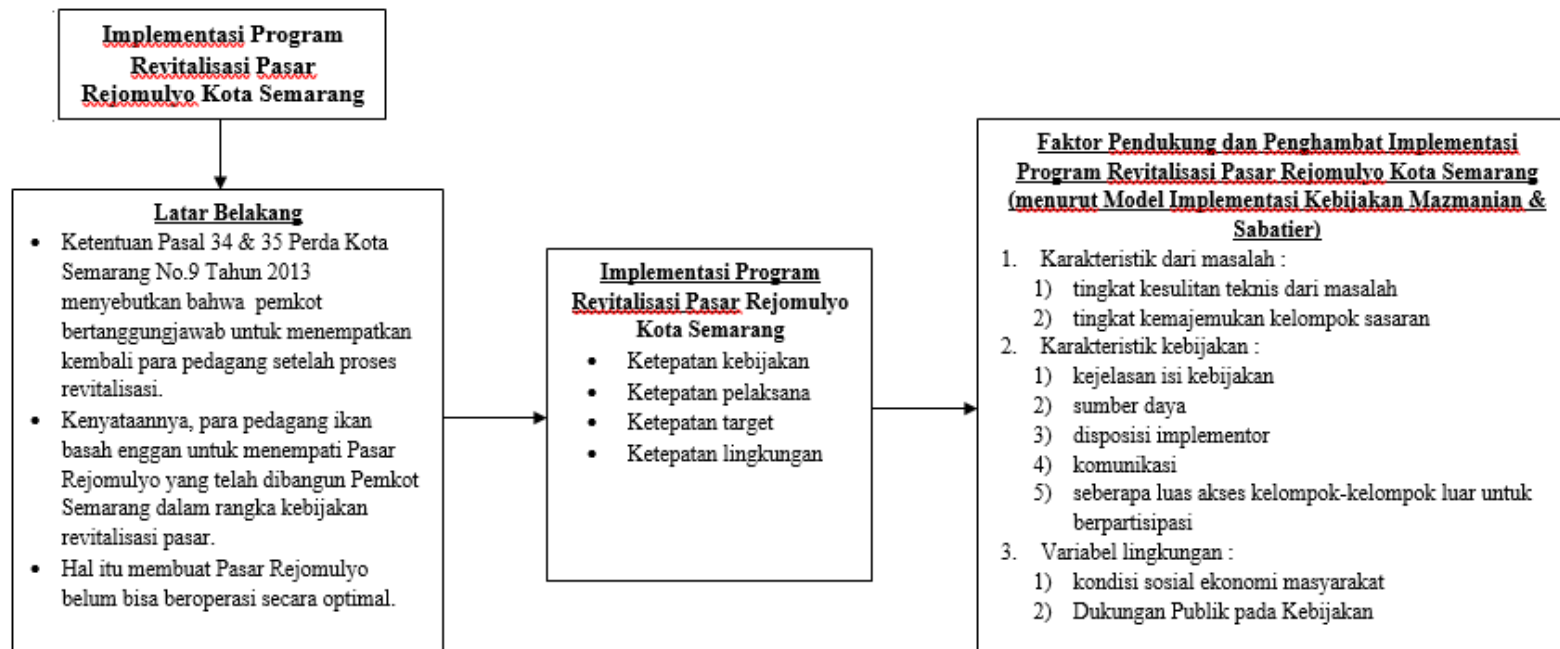
- Seberapa luas akses kelompok sasaran untuk berpartisipasi dalam implementasi program.
- Apakah sarana partisipasi yang dipilih oleh kelompok sasaran
- Bagaimana respon implementor terhadap partisipasi dari kelompok sasaran.

- Bagaimana respon kelompok sasaran terhadap respon atau tindakan yang dipilih oleh implementor.

### 3) Variabel Lingkungan

- a. Kondisi Ekonomi: Pendapatan per hari kelompok sasaran.
- b. Kondisi Sosial: Kondisi sosial terdiri atas kondisi masyarakat dan lingkungan tempat program revitalisasi diterapkan.
- c. Dukungan publik atau masyarakat terhadap program.

### 1.6.1 Kerangka Berpikir



## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif dan eksploratif. Hal ini dinyatakan oleh Pasolong (2012:75) dalam Metode Penelitian Administrasi Publik yang menjelaskan beberapa desain penelitian. Adapun beberapa desain penelitian tersebut adalah:

a. Penelitian Deskriptif (Penggambaran)

Merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian. Upaya dalam penelitian penggambaran ini adalah mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini tidak berusaha untuk menganalisis hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif.

b. Penelitian Eksploratif (Penjajakan)

Merupakan suatu penelitian yang sifatnya terbuka, serta masih mencari-cari dan belum memiliki hipotesa, pengetahuan penelitian tentang gejala yang ingin diteliti masih kurang, sehingga penelitian penjajakan ini sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk penelitian penjelasan maupun penelitian deskriptif. Melalui eksploratif tersebut masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih terperinci.

Berdasarkan penjelasan mengenai desain penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini memilih desain penelitian deskriptif, sehingga desain penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Desain ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan dibatasi waktu serta pengumpulan informasi secara lengkap dengan prosedur pengumpulan data yang telah ditetapkan.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu Implementasi Program Revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Semarang, khususnya di : Dinas Perdagangan Kota Semarang, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Wilayah Karimata dan Pasar Rejomulyo Kota Semarang.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan individu dan atau kelompok yang diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek juga disebut juga sebagai informan. Sedangkan peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009:222).



Informan merupakan orang yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai kondisi latar penelitian. Penelitian kualitatif memiliki satu *key informant* yang nantinya akan menunjuk informan selanjutnya guna memperoleh informasi yang lebih dalam. Key informant dalam penelitian ini adalah Kepala atau pegawai Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu pihak yang terkait dengan kebijakan penataan pedagang pasca revitalisasi Pasar Ikan Rejomulyo Kota Semarang. Teknik pengambilan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu untuk menentukan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang terlibat langsung dengan persoalan yang diteliti atau setidaknya mengetahui persoalan yang terdapat dalam program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang. Sedangkan nantinya informan dalam penelitian ini akan bertambah di lapangan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah pemilihan informan yang terus berkembang jumlahnya hingga informasi dan data yang diperoleh dirasa cukup (Pasolong,2012:161-162). Untuk memperoleh informasi yang cukup, maka informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Badan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Semarang
2. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang
3. Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Dinas Perdagangan Kota Semarang

4. Kepala Pasar Rejomulyo
5. Ketua Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Rejomulyo
6. Pedagang ikan basah
7. Pedagang bumbon
8. Pembeli
9. Masyarakat sekitar pasar

#### **1.7.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kata-kata tertulis, teks/tulisan, serta tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial.

1. Kata-kata tertulis

Kata-kata tertulis merupakan sumber data utama. Hasil wawancara dengan informan akan dicatat dalam catatan tertulis, rekaman audio, dan pengambilan foto.

2. Teks/tulisan

Teks atau tulisan yang dapat merepresentasikan keadaan yang sedang terjadi berupa arsip, dokumen resmi maupun buku.

3. Tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial

Data yang diperoleh berupa situasi atau kondisi tempat diadakan penelitian dimana terdapat banyak kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh obyek penelitian.

### **1.7.5 Sumber Data**

Penelitian mengenai Implementasi Program Revitalisasi Pasar Rejomulyo menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Pasolong (2012:70) menjelaskan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang didapat dari hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang didapat oleh peneliti selama proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber data berupa hasil wawancara didapatkan dari beberapa informan yang ditemui peneliti secara langsung.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bentuk dari data sekunder ini berupa catatan-catatan, buku-buku literatur, dokumen, laporan, serta

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian implementasi program revitalisasi Pasar Rejomulyo Kota Semarang.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2010:401) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan gabungan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan melakukan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

#### **2. Observasi**

Teknik observasi atau pengamatan yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada obyek yang diteliti sehingga dapat menunjang dalam penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana

yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe observasi terus terang yaitu menyatakan terus terang kepada narasumber bahwa sedang melakukan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan bentuknya berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dll. Studi dokumen merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara karena tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.

#### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Secara sistematis proses ini dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan deskriptif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

### 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2016:247). Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan lebih mempermudah peneliti untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

### 3. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan sebagainya. Menyajikan data dalam penelitian kualitatif seringkali menggunakan teks yang bersifat naratif (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2016:249). Selain dengan menggunakan teks naratif, penulis juga menggunakan gambar dan tabel untuk menyajikan data.

### 4. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ada bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Apabila kesimpulan yang diambil pada tahap awal penelitian didukung oleh bukti-bukti kuat, valid dan konsisten saat pengambilan data maka kesimpulan yang dikemukakan akan menjadi kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas yang berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

#### **1.7.8 Kualitas Data**

Creswell (2014:286) menjelaskan bahwa validitas data merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur –prosedur tertentu. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.

Dalam penelitian ini teknik validitas data yang digunakan peneliti adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik.

Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik.

Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat uji, sehingga substansi kebenaran dianggap benar apabila tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholders. Denzin dalam Bungin (2012:257-259) membedakan empat macam triangulasi untuk menguji keabsahan hasil penelitian, yaitu:

1. Triangulasi kejujuran peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan dengan meminta bantuan dari peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan.

2. Triangulasi sumber data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.

3. Triangulasi Metode

Pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview.



#### 4. Triangulasi Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyetarakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Alasan penulis menggunakan triangulasi sumber data disebabkan metode tersebut dapat menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  
Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.